

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia pernah mengalami krisis keuangan hebat pada tahun 1997 yang telah merusak tatanan dan sendi-sendi perekonomian Indonesia khususnya dunia perbankan. Hal ini mengakibatkan terjadi krisis perbankan terparah dalam sejarah perbankan Nasional yang menyebabkan penurunan kinerja perbankan nasional. Bergagai penelitian menyebutkan bahwa krisis ekonomi hebat yang melanda Indonesia terjadi karena buruknya *Good Corporate Governance* di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Baird bahwa salah satu penyebab timbulnya krisis ekonomi di Indonesia dan juga diberbagai Negara Asia lainnya adalah buruknya pelaksanaan *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan yang baik) di hampir semua perusahaan yang ada, baik perusahaan yang dimiliki pemerintah (BUMN) maupun yang dimiliki pihak Swasta. Dengan buruknya pelaksanaan *Good Corporate Governance*, maka tingkat kepercayaan para pemilik modal menjadi turun karena investasi yang mereka lakukan menjadi tidak aman.

Penilaian kinerja suatu entitas bisnis maupun manajemen bisnis dewasa ini tidak hanya diukur dengan moneter, akuntansi maupun rasio-rasio tertentu juga harus dilengkapi dengan kinerja non-keuangan seperti penerapan *Good Corporate Governance*.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam sebuah perusahaan sangat penting sebagai salah satu sistem

untuk menjaga kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang, terutama perusahaan perbankan yang sangat berpengaruh dalam perekonomian Negara. Tata kelola perusahaan berkonsentrasi pada keseimbangan antara ekonomi dan sosial juga antara individu dan masyarakat. Tujuannya untuk menyeimbangkan sebaik mungkin kepentingan individu, perusahaan dan masyarakat.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam sebuah perusahaan sangat dianjurkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). Sebagai perusahaan publik, Perseroan senantiasa berusaha menjaga objektivitas dalam menjalankan kegiatan usahanya, dengan cara menyediakan informasi yang material dan relevan kepada *shareholders* dan *stakeholders*, serta memastikan bahwa informasi disediakan tepat waktu, memadai, jelas, akurat, serta mudah diakses.

Jika perusahaan tidak menerapkan GCG maka akan berdampak tidak baik bagi perusahaan perbankan. Seperti menurunkan tingkat kepercayaan nasabah, berpengaruh pada harga saham dan kepercayaan mitra untuk melakukan transaksi bisnis. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa nama baik perusahaan merupakan salah satu aset berharga, terlebih lagi untuk industri perbankan yang dasarnya adalah kepercayaan antara penyimpan dana dan penghimpun dana. Penilaian GCG dilakukan dengan 4 (empat) indikator yaitu, Dewan Direksi, Komisaris Independen, Jumlah Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Ukuran yang dicapai dalam menilai kinerja perusahaan sangatlah bermacam-macam dan berbeda-beda dari satu industri ke industri lainnya tergantung pada aktivitas pokok perusahaan seperti produksi, keuangan,

pemasaran, sumberdaya manusia, dan banyak lagi kegiatan lainnya. Kinerja keuangan adalah salah satu tolak ukur dalam menilai suatu perusahaan, kondisi keuangan yang bagus cenderung menarik perhatian investor. Dalam hubungannya dengan kinerja, laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk menilai kinerja perusahaan. Namun tidak semua informasi dalam laporan keuangan perusahaan benar. Dalam perusahaan yang tata kelolanya kurang baik, bisa terjadi kondisi dimana informasi dalam laporan keuangan tidak sesuai dengan fakta dilapangan.

Adapun dampak dari penerapan GCG yang baik bagi perusahaan yaitu diharapkan perusahaan dapat mampu menjaga keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang tidak hanya semata keberlangsungan jangka panjang tetapi juga menjaga hubungan baik antara perusahaan terhadap sosial seperti masyarakat ataupun lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Good Corporate Governace terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada Bank Umum Milik Negara (BUMN) dan Swasta di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2016”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian adalah :

1. Apakah Dewan Direksi berpengaruh terhadap Kinerja keuangan ?
2. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Kinerja keuangan?

3. Apakah Jumlah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Kinerja keuangan?
4. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja keuangan?
5. Apakah Dewan Direksi, Komisaris Independen, Jumlah Dewan Komisaris dan Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja keuangan.
2. Untuk menganalisis pengaruh Komisaris Independen terhadap Kinerja keuangan.
3. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Dewan Komisaris terhadap Kinerja keuangan.
4. Untuk menganalisis pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja keuangan.
5. Untuk menganalisis pengaruh Dewan Direksi, Komisaris Independen, Jumlah Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap kinerja keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat Penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja keuangan perbankan khususnya bank BUMN dan Swasta.

2. Bagi investor, diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu informasi baru dalam menilai keadaan kinerja Keuangan dipasar modal.
3. Bagi Penulis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk lebih memahami bagaimana menganalisis dan memecahkan masalah-masalah yang nyata melalui teori-teori yang selama ini diperoleh, dan juga sebagai pengetahuan, pengalaman yang berharga untuk penelitian selanjutnya.
4. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan memperluas informasi dan wawasan.

1.5 Pembatasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih terarah maka perlu diadakan pembatasan penelitian yaitu perusahaan yang diteliti hanya perusahaan pada Bank BUMN dan Bank Umum Swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Dewan Direksi, Komisaris Independen, Jumlah Dewan Komisaris dan Komite Audit dimana untuk mengukur rasio *profitabilitas* digunakan rasio ROA dengan tahun amatan yang diteliti yaitu 2014-2016.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Wuryanti K (2015) dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance, Leverage* dan *Corporate Social Responcibility* Terhadap Kinerja Keuangan, (Studi Kasus Pada

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2010-2013). Alasannya Penulis melakukan replikasi adalah untuk menguji kembali apakah benar terjadi Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Leverage* dan *Corporate Social Responcibility* terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2010-2013). Hasil penelitian ini adalah secara parsial variabel GCG, Leverage dan CSR pengaruh terhadap kinerja keuangan.

Perbedaan Penelitian ini dengan Wuryanti K (2015) terletak pada tahun amatan 2010-2013 dan Studi Kasus pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI, sedangkan penelitian ini yang diteliti yaitu perusahaan Perbankan BUMN dan Bank Umum Swasta yang terdaftar di BEI pada tahun amatan yaitu 2014-2016.

1.6 Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran umum dari sistematika penulisan proposal ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan sub-bab yaitu tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah dan originalitas, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menguraikan beberapa teori yang akan mendasari penulisan proposal ini berisikan uraian teori-teori

yang akan digunakan dalam penelitian, hasil penelitian yang relevan, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas tentang objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan defenisi operasional, teknik analisis data, dan jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan deskripsi data, pengujian hipotesis dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang akan dijelaskan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Good Corporate Governance

Corporate Governance sudah bukan merupakan pilihan lagi bagi pelaku bisnis, tetapi juga merupakan suatu keharusan, dan kebutuhan vital serta sudah merupakan suatu tuntutan masyarakat, setiap tindakan memerlukan pertanggungjawaban, baik itu tindakan dalam bisnis dan sebagainya. Bagi Indonesia, *Good Corporate Governance* saat ini merupakan salah satu persyaratan yang di minta IMF (*International Monetary Fund*) yang harus di usahakan pemerintah Indonesia. Pada awal 2007, Komite Nasional Kebijakan *Governance* telah menyempurnakan pedoman umum yang pertama di Indonesia. Ini merupakan sebuah bukti kepedulian terhadap penciptaan kondisi usaha yang lebih baik dan menjanjikan di Indonesia jika diterapkan secara konsisten.

Menurut Sutedi (2011) *Good Corporate Governance* (GCG) dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang di gunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham / dewan pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai / kekayaan para pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Menurut Sutedi (2011) bahwa GCG secara defenisi merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value addad*) untuk semua *stakeholder*.

Pengertian *Corporate Governance* berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-117M-MBU/2002, adalah “Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder*, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa GCG adalah suatu sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkesinambungan (*Sustainable*) untuk meningkatkan nilai perusahaan, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholder*, karyawan, kreditor dan masyarakat sekitar.

A. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Prinsip-prinsip GCG menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, di antaranya: *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency* dan *Fairness* (Tarif).

a. *Transparency* (Keterbukaan)

Transparency yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Dalam mewujudkan transparansi, perusahaan harus menyediakan

informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Transparansi diperlukan agar Perusahaan menjalankan bisnis secara objektif dan sehat. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, perusahaan mitra, pengguna jasa, dan pemangku kepentingan lainnya.

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Accountability (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bila prinsip *accountability* (akuntabilitas) ini diterapkan secara efektif, maka perusahaan akan terhindar dari *agency problem* (benturan kepentingan peran). Pengelolaan perusahaan harus didasarkan pada pembagian kekuasaan diantara manajer perusahaan, yang bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh dewan direksi. Dewan direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan (*oversight*) dan pengawasan.

c. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Responsibility (pertanggungjawaban) adalah kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.

d. *Independency* (Kemandirian)

Independency atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independensi penting sekali dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut.

e. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Fairness yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Fairness* diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan *prudent* (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara *fair* (jujur dan adil). Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/ 15/ DPNP Tanggal April 2013 tentang pedoman GCG bagi Bank Umum, dijelaskan mengenai unsur penilaian GCG Perbankan meliputi 11 indikator yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;

5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal; dan
11. Rencana strategis Bank.

Dalam aturan tersebut dari total 11 (sebelas) indikator yang ada, penilaian GCG dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat empat aspek yang digunakan yaitu, Dewan Direksi, Komisaris Independen, Jumlah Dewan Komisaris dan Komite Audit.

1) Dewan Direksi

Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengertian dari Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dalam Pedoman GCG tidak dinyatakan secara kuantitatif jumlah atau komposisi dari direksi, namun demikian jumlah anggota direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam

pengambilan keputusan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku maka untuk menentukan ukuran dewan direksi akan memakai rumusan sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Dewan Direksi} = \text{Jumlah Anggota Dewan Direksi}$$

2) Komisaris Independen

Dewan komisaris merupakan pihak penting dalam pelaksanaan mekanisme GCG di perusahaan. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia dalam Pina (2017) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menjelaskan beberapa hal tentang dewan komisaris. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut :

1. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
2. Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris :

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.
2. Dewan Komisaris dapat terdiri dari Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen dan Komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta perusahaan itu sendiri. Mantan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi.
3. Jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari Komisaris Independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.
4. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui proses yang transparan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, badan usaha milik negara dan atau daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, proses penilaian calon anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum dilaksanakan RUPS melalui Komite Nominasi dan Remunerasi. Pemilihan

Komisaris Independen harus memperhatikan pendapat pemegang saham minoritas yang dapat disalurkan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi.

5. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar dan setelah kepada anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk membela diri.

Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris :

1. Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas, sehingga keputusan kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab Direksi. Kewenangan yang ada pada Dewan Komisaris tetap dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan penasihat.
2. Dalam hal ini diperlukan untuk kepentingan perusahaan, Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota Direksi dalam bentuk pemberhentian sementara, dengan ketentuan harus segera ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan RUPS.
3. Dalam hal terjadi kekosongan dalam Direksi atau dalam keadaan tertentu untuk sementara Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi Direksi.
4. Dalam rangka melaksanakan fungsinya, anggota Dewan Komisaris baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri berhak mempunyai akses dan memperoleh informasi tentang perusahaan tepat waktu dan lengkap.
5. Dewan Komisaris harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (*charter*) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja mereka.

6. Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh Direksi, dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) dari RUPS.
7. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite. Usulan dari komite disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, sekurang-kurangnya harus membentuk Komite Audit, sedangkan komite lain dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Pengawasan oleh dewan komisaris akan menambah keyakinan bahwa manajemen telah bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, karena dewan komisaris diangkat oleh pemegang saham dalam mengawasi tindakan manajemen.

Disamping itu, dalam pemecahan masalah antara manajer internal dan pengawasan kebijakan manajemen serta pemberian nasihat kepada manajemen diperlukan pihak ketiga yang independen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*.

Menurut Effendi (2009:9) komisaris independen (*independent commissioner*) berfungsi sebagai komposisi kekuatan penyeimbang (*contreveiling*

power) dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Oleh karena itu, dewan komisaris dan komisaris independen diharapkan tidak hanya sebagai pelengkap saja. Penelitian Nasution dan Setiawan (2007) untuk menentukan proporsi komisaris independen yaitu :

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Anggota Komisaris}} \times 100\%$$

3) Jumlah Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah salah satu mekanisme yang digunakan untuk memonitor manajer. Ukuran dewan komisaris dapat mempengaruhi efektif tidaknya aktivitas pengawasan. Menurut Faisal (2005) mengungkapkan bahwa peningkatan ukuran dewan komisaris akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya *network* dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumber daya. Menurut Chtourou et al (2001) dalam penelitiannya bahwa dengan jumlah dewan yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen perusahaan akan semakin baik. Jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang *resources dependence*. Maksud dari pandangan *resources dependence* adalah bahwa perusahaan akan tergantung dengan dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik. Dewan komisaris yang ukurannya besar kurang efektif daripada dewan komisaris yang ukurannya kecil. Jensen & Eisenberg et.al (dalam Faisal, 2005) menyatakan jumlah dewan komisaris yang kecil akan meningkatkan kinerja perusahaan.

4) Komite Audit

Pengertian komite audit menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yaitu: “Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen”. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Luar Emiten atau Perusahaan Publik. Komite audit, diukur dengan anggota komite audit yang dimiliki suatu perusahaan (Siallagan 2006). Maka sesuai dengan peraturan yang berlaku, rumusan untuk menentukan ukuran komite audit adalah sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Komite Audit}$$

B. Unsur-unsur Good Corporate Governance

Menurut Adrian Sutedi (2011) dalam penerapan GCG pada perbankan dibutuhkan unsur yang mendukung. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

a. *Corporate governance*-internal perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari perusahaan adalah:

- 1) Pemegang saham;
- 2) Direksi;
- 3) Dewan komisaris;

- 4) Manajer;
 - 5) Karyawan;
 - 6) Sistem remunerasi berdasarkan kinerja;
 - 7) Komite audit.
- b. *Corporate governance*-eksternal perusahaan Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah:
- 1) Kecukupan undang-undang dari perangkat hukum;
 - 2) Investor;
 - 3) Institusi penyedia informasi;
 - 4) Akuntan publik;
 - 5) Pemberi pinjaman;
 - 6) Institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan;
 - 7) Lembaga yang mengesahkan legalitas.

C. Manfaat Good Corporate Governance

Penerapan GCG banyak memberikan manfaat baik bagi perusahaan maupun pihak lain yang mempunyai hubungan langsung dan tidak dengan perusahaan.

Adapun manfaat dari GCG adalah :

1. Meningkatkan kualitas kerja para karyawan,
2. Meningkatkan keterikatan kerja para karyawan,
3. Meningkatkan kinerja perusahaan, Neraca perusahaan yang lebih baik,
4. Penggunaan sumber daya yang lebih efektif, Dapat mencegah munculnya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

5. Suasana lingkungan bekerja yang lebih baik,
6. Mencegah terjadinya turnover pada karyawan,
7. Melindungi hak para pemegang saham,
8. Meningkatkan nilai perusahaan dan menarik investor.

2.1.2 Kinerja Keuangan Perusahaan

Kinerja keuangan diartikan sebagai penentuan ukuran – ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam mengukur kinerja keuangan perlu dikaitkan antara perusahaan dengan pusat pertanggungjawaban (Ermayanti, 2009). Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya kepada para pemilik perusahaan.

Salah satu indikator penting yang digunakan dalam persaingan industri adalah daya tarik bisnis (*bussines attractiveness*). Indikator ini dapat diukur dengan rasio *profitabilitas* industri yang seperti ROA.

Rasio *Profitabilitas* atau *rentabilitas* digunakan untuk mengukur efisiensi suatu perusahaan dalam menggunakan aktivitya, efisiensi ini dikaitkan dengan penjualan yang berhasil diciptakan.

Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu gambaran mengenai kondisi dan keadaan dari suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat – alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik atau buruknya kondisi keuangan dan prestasi kerja sebuah perusahaan dalam waktu tertentu. Kinerja keuangan digunakan untuk mengetahui hasil tindakan yang telah dilakukan di masa lalu.

Ukuran keuangan juga dilengkapi dengan ukuran – ukuran non keuangan yang menunjukkan kepuasan pelanggan, produktivitas dan *cost effectiveness* proses bisnis dan produktifitas serta komitmen dari tiap personal untuk menentukan kinerja keuangan di masa yang akan datang.

Menurut Eduardus Tandelilin (2010:372) *Return on Asset* (ROA) adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba. *Return on Asset* (ROA) dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100 \%$$

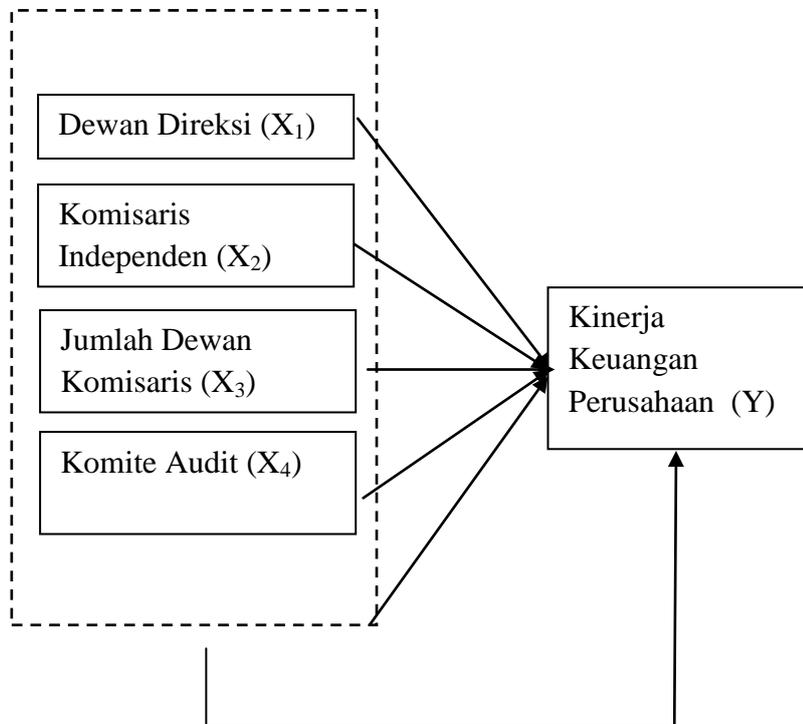
2.2 Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan terdahulu oleh Wuryanti K (2015) dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Leverage* dan *Corporate Social Responcibility* Terhadap Kinerja Keuangan. (Studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh parsial variabel GCG,*leverage* keuangan terhadap CSR dan pengaruh parsial variabel GCG, *leverage* keuangan,CSR terhadap kinerja keuangan. Tekhnik analisis yang digunakan dalam penelian ini adalah regresi linier berganda, uji t dan SPSS. Hasil pengujian pengaruh parsial, variabel GCG dan *leverage* keuangan (DER) terhadap CSR.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Venno Andri (2015) dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan (Perusahaan

Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2011-2013). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Dewan Direksi berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan, untuk mengetahui Komisaris Independen berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan, untuk mengetahui Jumlah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan, untuk mengetahui Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan. Tekhnis analisis adalah regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, uji f dan uji t. Hasil penelitian Jumlah perusahaan *go public* yang terdaftar di BEI Tahun 2011-2013 sebanyak 48 perusahaan dengan tahun pengamatan selama 3 tahun.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wehdawati (2015) dengan judul Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* dan struktur kepemilikan Terhadap Kinerja Keuangan (Pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012). Tujuan Penelitian adalah Untuk menganalisis pengaruh jumlah Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan, untuk menganalisis pengaruh proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan perusahaan, untuk menganalisis pengaruh jumlah Komite Audit terhadap kinerja keuangan perusahaan, untuk menganalisis pengaruh jumlah Dewan Direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan, untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan. Tekhnik analisis regresi berganda, uji asumsi klasik, uji f dan uji t. Hasil penelitian adalah secara simultan, variabel jumlah dewan komisaris yang tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Berdasarkan rumusan masalah maka dalam penelitian ini dibuat hipotesis sebagai berikut:

H1 : Diduga secara Parsial Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja keuangan Pada Bank BUMN dan Swasta yang terdaftar di BEI.

- H2 : Diduga secara Parsial Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Kinerja keuangan Pada Bank BUMN dan Swasta yang terdaftar di BEI.
- H3: Diduga secara Parsial Jumlah Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap Kinerja keuangan Pada Bank BUMN dan Swasta yang terdaftar di BEI.
- H4 : Diduga secara Parsial Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Kinerja keuangan Pada Bank BUMN dan Swasta yang terdaftar di BEI.
- H5 : Diduga secara Simultan Dewan Direksi, Komisaris Independen, Jumlah Dewan Komisaris dan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pada Bank BUMN dan Swasta yang terdaftar di BEI.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Adapun objek dari penelitian ini adalah di Perusahaan Perbankan Badan Umum Milik Negara (BUMN) dan Bank Umum Swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Karena penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang melibatkan pengukuran tingkatan suatu ciri tertentu. Penelitian kuantitatif mencakup setiap jenis penelitian yang didasarkan atas perhitungan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan Perusahaan Perbankan Badan Umum Milik Negara (BUMN) dan Bank Umum Swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 80). Mengacu pada definisi tersebut maka populasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah seluruh Perusahaan Perbankan Badan Umum Milik Negara

(BUMN) dan Bank Umum Swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016.

Tabel 3.1
Daftar nama Perusahaan Perbankan Badan Umum Milik Negara (BUMN) dan Bank Umum Swasta

NO	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Tahun		
			2014	2015	2016
1	AGRO	Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	X	√	√
2	AGRS	Bank Agris Tbk	X	√	√
3	BABP	Bank MNC Internasional Tbk	X	√	√
4	BACA	Bank Capital Indonesia Tbk	√	√	√
5	BAEK	Bank Ekonomi Raharja Tbk	√	√	√
6	BBCA	Bank Central Asia Tbk	√	√	√
7	BBKP	Bank Bukopin Tbk	√	√	√
8	BBMD	Bank Mestika Dharma Tbk	√	√	√
9	BBNI	Bank Negara Indonesi (Persero) Tbk	√	√	√
10	Bbnp	Bank Nusantara Parahyangan Tbk	√	√	√
11	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	X	√	√
12	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	X	√	√
13	BCIC	Bank Mutiara Tbk	√	√	√
14	BDMN	Bank Danamon Indonesia Tbk	√	√	√
15	BEKS	Bank Pundi Indonesia Tbk	X	√	√
16	BINA	Bank Ina Perdana Tbk	X	√	√
17	BJBR	BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	X	√	√
18	BJTM	BPD Jawa Timur Tbk	X	√	√
19	BKSW	Bank QNB Indonesia Tbk	X	√	√
20	BMAS	Bank Maspion Indonesia Tbk	√	√	√
21	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk	√	√	√
22	BNBA	Bank Bumi Arta Tbk	√	√	√
23	BNGA	Bank CIMB Niaga Tbk	√	√	√
24	BNII	Bank Internasional Indonesia Tbk	√	√	√
25	BNLI	Bank Permata Tbk	√	√	√
26	BSIM	Bank Sinarmas Tbk	X	√	√
27	BSWD	Bank Of India Indonesia Tbk	√	√	√
28	BTPN	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	X	√	√
29	BVIC	Bank Victoria International Tbk	X	√	√

30	DNAR	Bank Dinar Indonesia Tbk	X	√	√
31	INPC	Bank Artha Graha Internasional Tbk	√	√	√
32	MAYA	Bank Mayapada Internasional Tbk	√	√	√
33	MCOR	Bank Windu Kentjana Internasional Tbk	X	√	√
34	MEGA	Bank Mega Tbk	√	√	√
35	NAGA	Bank Mitraniaga Tbk	√	√	√
36	NISP	Bank OCBC NISP Tbk	√	√	√
37	NOBU	Bank Nationalnobu Tbk	√	√	√
38	PNBN	Bank Pan Indonesia Tbk	√	√	√
39	PNBS	Bank Panim Syariah Tbk	X	√	√
40	SDRA	Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	√	√	√
41	BABP	Bank ICB Bumiputera Tbk	√	X	X

Sumber data : www.idx.co.id

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Teknik pengambilan sampel dipilih secara *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan kriteria-kriteria yang menjadi pertimbangan dalam penetapan sampel antara lain:

1. Perusahaan Perbankan Badan Umum Milik Negara (BUMN) dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016
2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan yang dinyatakan dalam rupiah dan berakhir pada tanggal 31 Desember selama periode pengamatan tahun 2014-2016.
3. Perusahaan yang memiliki kelengkapan data mengenai Variabel penelitian.

Daftar nama perusahaan Perbankan yang termasuk berdasarkan kriteria yang telah ditentukan Bank BUMN dan Swasta ada sebanyak 24 Perusahaan.

NO	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)		
1	BBNI	Bank Negara Indonesi (Persero) Tbk
2	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bank Swasta		
3	BACA	Bank Capital Indonesia Tbk
4	BAEK	Bank Ekonomi Raharja Tbk
5	BBCA	Bank Central Asia Tbk
6	BBKP	Bank Bukopin Tbk
7	BBMD	Bank Mestika Dharma Tbk
8	Bbnp	Bank Nusantara Parahyangan Tbk
9	BCIC	Bank Mutiara Tbk
10	BDMN	Bank Danamon Indonesia Tbk
11	BMAS	Bank Maspion Indonesia Tbk
12	BNBA	Bank Bumi Arta Tbk
13	BNGA	Bank CIMB Niaga Tbk
14	BNII	Bank Internasional Indonesia Tbk
15	BNLI	Bank Permata Tbk
16	BSWD	Bank Of India Indonesia Tbk
17	INPC	Bank Artha Graha Internasional Tbk
18	MAYA	Bank Mayapada Internasional Tbk
19	MEGA	Bank Mega Tbk
20	NAGA	Bank Mitraniaga Tbk
21	NISP	Bank OCBC NISP Tbk
22	NOBU	Bank Nationalnobu Tbk
23	PNBN	Bank Pan Indonesia Tbk
24	SDRA	Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk

Sumber data : www.idx.co.id

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis Penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang berupa angka-angka yang sudah diolah dan didokumentasikan oleh Bursa Efek Indonesia yaitu berupa laporan keuangan perusahaan Perbankan Badan Umum Milik Negara (BUMN)

dan Bank Umum Swasta 2014-2016. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan cara dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan informasi laporan keuangan perusahaan Perbankan Badan Umum Milik Negara (BUMN) dan Bank Umum Swasta 2014-2016 serta data-data yang relevan dengan penelitian baik dari pihak perusahaan maupun dari buku-buku dan internet.

3.6 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

3.6.1 Variabel Independen

Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel yang lainnya (variabel dependen). Variabel independen dari penelitian ini adalah Dewan Direksi, Komisaris Independen, Jumlah Dewan Komisaris dan Komite Audit.

3.6.1.1 Dewan Direksi (X_1)

Dalam Pedoman Good Corporate Governance tidak dinyatakan secara kuantitatif jumlah atau komposisi dari direksi, namun demikian jumlah anggota direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Sesuai dengan

peraturan yang berlaku maka untuk menentukan ukuran dewan direksi akan memakai rumusan sebagai berikut:

$$\text{Dewan Direksi} = \text{Anggota Dewan Direksi}$$

3.6.1.2 Komisaris Independen (X₂)

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata sesuai kepentingan perusahaan.

$$\text{Ukuran Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Anggota Komisaris}} \times 100\%$$

3.6.1.3 Jumlah Dewan Komisaris (X₃)

Dewan komisaris adalah salah satu mekanisme yang digunakan untuk memonitor manajer. Ukuran dewan komisaris dapat mempengaruhi efektif tidaknya aktivitas pengawasan. Peningkatan ukuran dewan komisaris akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya network dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumber daya. bahwa dengan jumlah dewan yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen perusahaan akan semakin baik. Jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang resources dependence. Maksud dari pandangan resources dependence adalah bahwa perusahaan akan tergantung dengan dewannya untuk

dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik. Dewan komisaris yang ukurannya besar kurang efektif daripada dewan komisaris yang ukurannya kecil. Karena jumlah dewan komisaris yang kecil akan meningkatkan kinerja perusahaan.

3.6.1.4 Komite Audit (X₄)

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Pedoman Good Corporate Governance tidak mengatur banyaknya anggota Komite Audit dalam suatu perusahaan namun harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Maka sesuai dengan peraturan yang berlaku, rumusan untuk menentukan ukuran komite audit adalah sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Anggota Komite Audit}$$

3.6.2 Variabel Dependen

Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kinerja perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu gambaran mengenai kondisi dan keadaan dari suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat – alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik atau buruknya kondisi keuangan dan prestasi kerja sebuah perusahaan dalam waktu tertentu. Return on Asset (ROA) adalah rasio untuk menghitung laba

sebelum pajak terhadap total aset. Rasio ROA sering dipakai sebagai representatif laba perusahaan. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/ 24/ DPNP tanggal 25 Oktober 2011 ;17, dalam menilai capital suatu bank dapat digunakan Return on Asset (ROA) dengan rumus:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100 \%$$

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda yaitu metode yang digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukur atau rasio dalam suatu persamaan linier. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengujian regresi linier lima prediktor. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan :

Y : Kinerja Keuangan Perusahaan

X₁ : Dewan direksi

X₂ : Komisaris Independen

X₃ : Jumlah Dewan Komisaris

X₄ : Komite Audit

a,b : Konstanta

e : Error

3.7.2 Uji Hipotesis

Kaidah pengujian dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis secara statistik dilakukan dengan menggunakan :

1) Uji Parsial (Uji t)

Uji hipotesis dengan t_{hitung} digunakan untuk menguji koefisien regresi variabel independen. Uji hipotesis ini menggunakan alat bantu SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 18. Menguji apakah secara parsial (individu) variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen dengan membandingkan antara t_{tabel} dengan t_{hitung} . Untuk tingkat keyakinan yang digunakan adalah 95% atau tingkat kesalahan 5%.

Untuk menentukan nilai t_{tabel} dilakukan pada derajat kebebasan $df = (n - 1)$

1) dimana n adalah jumlah observasi. Perumusan hipotesis statistik :

$$H_0 : \beta = 0$$

$$H_a : \beta \neq 0$$

Dasar keputusan uji :

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima artinya tidak berpengaruh

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak artinya berpengaruh

2) Uji Simultan (Uji F)

Uji F statistik digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh yang secara bersama-sama terhadap

variabel dependen dengan membandingkan antara F_{tabel} dengan F_{hitung} . Dimana F_{hitung} dicari dengan menggunakan Software SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 18.

Untuk menghitung f_{tabel} , tingkat signifikan yang digunakan sebesar 5% dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) $df = (n-m-1)$ dimana n adalah jumlah observasi, m adalah jumlah variabel bebas.

Dasar keputusan uji :

Jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima artinya tidak berpengaruh

Jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ maka ditolak H_0 artinya berpengaruh

3) Koefisien Korelasi Berganda (R)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel sangat terbatas atau sangat lemah. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua hasil informasi yang dibutuhkan untuk memproduksi variabel dependen.

Penggunaan koefisien determinasi memiliki kelemahan mendasar, yaitu adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti yang

menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted* R^2 pada saat mengevaluasi model regresi mana yang terbaik, tidak seperti R^2 , nilai *adjusted* R^2 dapat naik turun apabila terdapat penambahan satu variabel independen.